

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Terdahulu

Rosiana, *et al* (2013), dalam E-Jurnal Akuntansi di Universitas Udayana dengan judul “Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang dipakai penelitian adalah 55 data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012 yang mana data dalam penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model dengan adjusted R^2 sebesar 37,6% yang diolah dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dan sebesar 77,8% yang diolah dengan menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.

Ferial (2016), dalam jurnal Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan”. *Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan eksistensinya diberbagai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan. Tingginya kinerja keuangan memberikan efek kepada nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dan efeknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Putra dan Wirakusuma (2015) dalam E-Jurnal Akuntansi di Universitas Udayana melakukan penelitian mengenai pengaruh CSR pada nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai pemoderasio. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian ini mengukur variabel nilai perusahaan dengan menggunakan Tobin's Q. Teknik analisis regresi moderasi. Pengukuran CSR mengacu pada *Global Reporting Initiative Generation 4.1* (GRI G 4.1). Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi diukur menggunakan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam perusahaan. (2) profitabilitas mampu memperkuat hubungan CSR pada nilai perusahaan dalam perusahaan. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu CSR serta satu variabel pemoderasi yaitu profitabilitas.

Cheng (2011) dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.13, No.1 tentang pengaruh pengungkapan CSR terhadap *abnormal return*. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *Return On Equity* (ROE) dan *Price Book Value* (PBV). Pengukuran pengungkapan CSR didasarkan pada *Global Reporting Initiative* (GRI). Sedangkan, *abnormal return* dihitung dengan menggunakan *market adjusted* model. Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan 40 perusahaan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap abnormal return yang menandakan bahwa investor mempertimbangkan informasi CSR untuk membuat keputusan. Variabel kontrol ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap *abnormal return*.

Ayu Lestari, *et al* (Vol.4 No. 1, 2016) dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap

pengungkapan CSR dengan mekanisme CG sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari IDX tahun 2010-2014. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan selama 5 tahun dari tahun 2010-2014. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dengan teknik analisis *Moderation Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- 1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSR;
- 2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap CSR;
- 3) Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR;
- 4) Ukuran dewan komisaris mampu memoderasi secara positif terhadap hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR;
- 5) Ukuran dewan komisaris bukan sebagai variabel moderasi hubungan leverage dengan pengungkapan CSR perusahaan.

Servaes and Tamayo (2012), from Journal Management Science in London School of Economics this journal title is "The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness".. This paper show that CSR and firm value are positively related for firms with high customer awareness, as proxied by advertising expenditures. For firms with low customers awareness, the relation is either negative or insignificant. In addition, we find that the effect of awareness on the value-CSR relation is reserved for firms with a poor prior reputation as corporate citizen. This evidence is consistent with the view that CSR activities can add value to the firm but only under certain conditions.

Servaes dan Tamayo (Vol. 59, 2013), dalam Jurnal Ilmu Manajemen pada Sekolah Ekonomi di London dengan judul "Dampak *Corporate Social Responsibility* pada Nilai Perusahaan: Peran Awareness Pelanggan". Makalah ini menunjukkan bahwa CSR dan nilai perusahaan berhubungan positif untuk perusahaan dengan kesadaran pelanggan yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh pengeluaran iklan. Untuk perusahaan dengan pelanggan rendah kesadaran, hubungan ini baik negatif atau tidak signifikan. Selain itu, kita menemukan bahwa efek dari kesadaran pada hubungan nilai-CSR dicadangkan untuk perusahaan dengan reputasi sebelum miskin sebagai warga negara korporasi. Bukti ini

konsisten dengan pandangan bahwa kegiatan CSR nilai tambah perusahaan tetapi hanya dalam kondisi tertentu.

Uwaloma (2011) from Covenant University, Nigeria, investigates of the relationship between management ownership and the level of corporate social responsibility disclosure of listed firms in Nigeria. Using the judgemental sampling technique, a total of 35 listed firms were selected for this study. Also, the annual reports for the periods 2006-2010 was utilized as the main source of data collection for the selected firms. In addition, the simple regression analysis was employed as a statistical technique for analyzing the data collected. The paper revealed that managerial ownership structure has a significant positive impact on the level of corporate social responsibility disclosures among firms. The paper therefore calls for the encouragement of more managerial investors to participate in the ownership of firms, since it would encourage them to participate more actively in monitoring and aligning of corporate social performance.

Uwaloma (2011) dari Universitas Covenant, Nigeria, meneliti tentang hubungan antara kepemilikan manajerial dan CSR pada perusahaan di Nigeria. Penelitian ini dilakukan dengan 35 sampel yang dipilih dengan teknik *judgemental sampling* pada tahun 2006-2010. Hasil penelitiannya adalah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan.

Harjoto and Jo in Journal of Business Ethics (2011) This Study investigates the effects of internal and external corporate governance and monitoring mechanisms on the choice of corporate social responsibility (CSR) engagement and the value of firms engaging in CSR activities. The study finds the CSR choice is positively associated with the internal and external corporate governance and monitoring mechanisms, including board leadership, board independence, institutional ownership, analyst following, and anti-takeover provisions, after controlling for various firm characteristics. After correcting for endogeneity and simultaneity issues, the result shows that CSR engagement positively influences firm value measured by industry-adjusted Tobin's Q. We find that the impact of analyst following for firms that engage in CSR on firm value is strongly positive, while the board leadership, board independence, blockholders ownership, and institutional ownership play a relatively weaker role in enhancing firm value. Furthermore, we find that CSR activities that address internal social enhancement within the firm, such as employee diversity, firm relationship with its employees, and product quality, enhance the value of firm

more than other CSR subcategories for broader external socialenhancement such as community relation and environmental concerns.

Menurut Harjoto dan Jo dalam *Journal of Bussiness Ethics* (2011) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan yang masuk kedalam *Kinder, Lydenberg, and Domini's (KLD) Stats database, Risk Mentrics (Investor Responsibility Research Center's (IRRC) governance and directors) database, and The Institutional Brokers Estimation Service (I/B/E/S) database* di Amerika Serikat pada tahun 1993-2004 dengan meneliti *Corporate Governance* dan nilai perusahaan merupajan pengaruh dari CSR. Kesimpulan dari penelitian ini adalah CSR berpengaruh positif terhadap faktor internal maupun eksternal *Corporate Governance* dan CSR juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat adanya ketidak konsistenan pada hasil penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah GCG, pengungkapan CSR dapat memoderasi hubungan Kinerja Keuangan perusahaan dengan Nilai Perusahaan dengan menggunakan periode pengamatan 2013-2016.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Muchtar Effendi (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi startegi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan (*going concern*). Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai

suatu sistem mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecekalaan serius atau skandal keuangan.

2.2.2 Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Menurut Michel Johnson dalam Achmad Daniri (2014:5) memandang bahwa perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Menurut Eisenhardt dalam Arief (2014) dalam teori keagenan terdapat tiga asumsi sifat manusia, yaitu : (1) pada dasarnya manusia mementingkan diri sendiri (*self-interest*), (2) daya pikir manusia mengenai persepsi masa depan sangat terbatas (*bounded rationality*), (3) manusia selalu berusaha untuk menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan sifat manusia tersebut, maka kita lihat bahwa seorang manajer sebagai manusia juga dapat melakukan tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadinya serta akan melakukan hal-hal untuk menghindari risiko yang akan dihadapi.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menimbulkan masalah keagenan. Oleh karena itu, prinsipal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat mengawasi kinerja manajer agar berjalan sesuai dengan harapannya. Aktivitas ini memunculkan biaya agensi yang menurut Jensen dan Meckling dalam Nugraha (2014) terdiri dari :

- a. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
- b. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.

- c. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

2.3 Kinerja Keuangan

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu, laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Sedangkan

laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan .

Menurut Fahmi (2011:28), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan lainnya yang diperlukan. Informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Jenis-jenis laporan keuangan (Subramanyam dan Wild, 2013:23-29):

a. Laporan Posisi Keuangan

Persamaan akuntansi (*accounting equation*) merupakan dasar sistem akuntansi: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$. Sisi kiri persamaan ini terkait dengan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan, atau aset. Sumber daya ini merupakan investasi yang diharapkan untuk menghasilkan laba di masa depan melalui aktivitas operasi. Sisi kanan persamaan ini mengidentifikasi sumber pendanaan.

Kewajiban (*liability*) merupakan pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan, atau klaim kreditor atas aset. Ekuitas atau ekuitas pemegang saham (*shareholders' equity*) merupakan total dari (1) pendanaan yang diinvestasikan atau dikontribusikan oleh pemilik dan (2) akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik (saldo laba) sejak berdirinya perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan untuk suatu periode waktu. Di bagian bawah, laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan.

c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham

Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan.

d. Laporan Arus Kas

Biasanya laba tidak sama dengan arus kas bersih, kecuali di sepanjang hidup perusahaan. Karena akuntansi akrual menghasilkan angka yang berbeda dari akuntansi arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode tertentu.

2.3.3 Ukuran Kinerja Keuangan

2.3.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:104) analisis laporan rasio laporan keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Berikut adalah jenis-jenis rasio keuangan menurut Kasmir :

a. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2016:128), Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih.

b. Rasio Solvabilitas (*Debt to Equity Ratio*)

Menurut Kasmir (2016:157), Rasio Solvabilitas (*Debt to Equity Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan atau untuk mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan uang. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio ini akan semakin baik. Sebagiknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan resiko keuangan perusahaan..

c. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016:196) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Laba juga sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya, seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA).

ROA menurut Kasmir (2016:201), ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA merupakan rasio yang terpenting diantara rasio yang ada. ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dari beberapa rasio yang sudah dijelaskan diatas, yang berkaitan langsung dengan penelitian adalah *Return On Assets* (ROA), karena ROA adalah salah satu bentuk kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan dan ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

2.4 Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham adalah pengertian menurut Sujoko dan Soebiantoro dalam Randy dan Juniarti (2013). Sedangkan harga pasar saham adalah nilai pasar sekuritas yang dapat diperoleh investor apabila investor menjual atau membeli saham, yang ditentukan berdasarkan harga penutupan atau *closing price* di bursa pada hari yang bersangkutan. Jadi, harga penutupan atau *closing price* merupakan harga saham terakhir kali pada saat berpindah tangan di akhir perdagangan. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.

Nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator-indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari kinerja keuangan yang diperoleh. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan meningkatnya harga

saham dipasar. Rasio keuangan dapat mengetahui nilai pasar yang dapat memberikan indikasi bagi manajemen penilaian bagi investor di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang.

2.4.1 Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Lang dalam Sudiyanto dan Puspitasari (2010) Tobins Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Salah satu alternatif dalam menilai perusahaan adalah dengan menggunakan rumus Tobins Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1976). Nilai Tobins Q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan atau potensi pertumbuhan nilai pasar saham (*market value of all outstanding stock*) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi (*replacement value all production capacity*), maka Tobins Q dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan.

$$Q = \frac{(MVE + D)}{(BVE + D)}$$

Keterangan :

Q = Nilai Perusahaan

MVE = Nilai Pasar Ekuitas (EMV = Closing Price x Jumlah saham)

BVE = Nilai Buku dari total ekuitas

D = Nilai Buku dari total hutang

2.5 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah usaha perusahaan dalam menyejahterakan para *stakeholder*-nya yaitu dengan cara memperlihatkan aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan sekitarnya (Rahayu, dkk, 2014:3). Perusahaan

yang menerapkan CSR dapat memperoleh legitimasi sosial dan meningkatkan penjualan. Semakin banyak perusahaan memberikan informasi sosial dan lingkungan, maka semakin banyak investor dan kreditor sebagai pelaku pasar akan memberikan respon positif terhadap perusahaan dan nantinya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa CSR adalah suatu kegiatan bagi perusahaan untuk memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat perusahaan berada. Kegiatan ini dengan berbagai macam bentuk yang manfaatnya bisa berlangsung lama bagi masyarakat dan lingkungan. Yang akhirnya dapat menjadi keberlangsungan masa depan perusahaan.

2.5.1 Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini departemen sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia (LENS INDONESIA, 2013). Selang beberapa waktu setelah itu, pemerintah mengimbau kepada pemilik perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun, ini hanya sebatas imbauan karena belum ada peraturan yang mengikat. Setelah tahun 2007 tepatnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas keluar, hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR, meski lagi-lagi kegiatan itu masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan keterikatan peraturan pemerintah.

Kini, perkembangan CSR sudah semakin meningkat dan makin kreatif dengan menyesuaikan pada kebutuhan perusahaan masing-masing. Setiani (2015)

mengatakan selama ini, secara teoritis CSR memiliki beberapa kategori pendekatan, yaitu: pasif, reaktif, aktif, dan proaktif.

1. Dalam pendekatan pasif, perusahaan menunggu sampai ada tekanan oleh otoritas dan pemangku kepentingan lain baru kemudian merespon tuntutan mereka dengan kegiatan CSR.
2. Dalam pendekatan reaktif, perusahaan melakukan CSR untuk mencegah potensi risiko ekologi dan sosial yang dapat mengganggu nilai atau reputasi perusahaan.
3. Dalam pendekatan aktif, perusahaan menyadari bahwa tanggung jawab sosial perusahaan menawarkan peluang strategis di pasar. Produk baru, layanan dan teknologi dapat menimbulkan bidang usaha baru. Karenanya perusahaan lebih aktif untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Dalam pendekatan proaktif, perusahaan sangat memperhitungkan kebutuhan yang ada, tetapi juga membentuk cara hidup yang berkelanjutan dan bisnis bersama dengan para pemangku kepentingan. Karenanya konsep CSR yang dilaksanakan sifatnya berkelanjutan dan berdampak lebih panjang bagi perusahaan.

2.5.2 Pengukuran *Corporate Social Responsibility*

Menurut Mardikanto (2014:187) metode untuk pengukuran CSR adalah menggunakan metode yang digunakan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

Variabel dalam pengukuran metode GRI terdiri atas:

- 1) Indikator kinerja ekonomi; mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tak langsung
- 2) Indikator kinerja lingkungan; meliputi air, energy, keragaman hayati, emisi, limbah dan sampah
- 3) Indikator kinerja sosial; terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dll.
- 4) Indikator kinerja praktik dan cara kerja

- 5) Ketenagakerjaan, hubungan perburuhan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, renumerasi yang seimbang laki-laki dan perempuan
- 6) Indikator kinerja hak azasi manusia, mencakup: praktik investasi dan pengadaan, non diskriminasi, kebebasan berorganisasi dan daya tawar kolektif, buruh anak, kewajiban buruh, praktik keamanan, hak masyarakat setempat, dll.
- 7) Indikator kinerja kemasyarakatan, yaitu: komunitas lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti-kompetitif, kepatuhan
- 8) Indikator kinerja tanggung jawab produk, meliputi: kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan layanan, komunikasi
- 9) Pemasaran, privasi pelanggan, kepatuhan.

CSR diukur berdasarkan pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSRDI (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*) berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut :

$$CSRDI = (\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}) / n_j$$

Keterangan :

CSRDI_j : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

X_{ij} : *dummy variable*: 1 = jika item I diungkapkan; 0 = jika item I tidak diungkapkan

Dengandemikian, $0 \leq CSRDI_j \leq 1$

N_j : jumlah item pengungkapan untuk perusahaan j, n_j = 91

Tabel 2.1 *Global Reporting Index CSR*

NO	KATEGORI	EKONOMI
	ASPEK :	KINERJA EKONOMI
1	G4-EC1	NILAI EKONOMI LANGSUNG YANG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN
2	G4-EC2	IMPLIKASI FINANSIAL DAN RISIKO SERTA PELUANG LAINNYA KEGIATAN ORGANISASI KARENA PERUBAHAN IKLIM
3	G4-EC3	CAKUPAN KEWAJIBAN ORGANISASI ATAU PROGRAM IMBALAN PASTI
4	G4-EC4	BANTUAN FINANSIAL YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH
	ASPEK :	KEBERADAAN PASAR
5	G4-EC5	RASIO UPAH STANDAR PEGAWAI PEMULA (ENTRY LEVEL) MENURUT GENDER DIBANDINGKAN DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL DI LOKASI-LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN
6	G4-EC6	PERBANDINGAN MANAJEMEN SENIOR YANG DIPEKERJAKAN DARI MASYARAKAT LOKAL DI LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN
	ASPEK :	DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG
7	G4-EC7	PEMBANGUNAN DAN DAMPAK DARI INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN JASA YANG DIBERIKAN
8	G4-EC8	DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN, TERMASUK BESARNYA DAMPAK
	ASPEK :	PRAKTIK PENGADAAN
9	G4-EC9	PERBANDINGAN PEMBELIAN DARI PEMASOK LOKAL DI LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN
	KATEGORI :	LINGKUNGAN
	ASPEK :	BAHAN
10	G4-EN1	BAHAN YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN BERAT ATAU VOLUME
11	G4-EN2	PERSENTASE BAHAN YANG DIGUNAKAN YANG MERUPAKAN BAHAN INPUT DAUR ULANG
	ASPEK :	ENERGI
12	G4-EN3	KONSUMSI ENERGI DALAM ORGANISASI
13	G4-EN4	KONSUMSI ENERGI DI LUAR ORGANISASI
14	G4-EN5	INTENSITAS ENERGI
15	G4-EN6	PENGURANGAN KONSUMSI ENERGI
16	G4-EN7	PENGURANGAN KEBUTUHAN ENERGI PADA PRODUK DAN JASA
	ASPEK :	AIR
17	G4-EN8	TOTAL PENGAMBILAN AIR BERDASARKAN SUMBER
18	G4-EN9	SUMBER AIR YANG SECARA SIGNIFIKAN DIPENGARUHI OLEH PENGAMBILAN AIR
19	G4-EN10	PERSENTASE DAN TOTAL VOLUME AIR YANG DIDAUUR ULANG DAN DIGUNAKAN KEMBALI
	ASPEK :	KEANERAGAMAN HAYATI
20	G4-EN11	LOKASI-LOKASI OPERASIONAL YANG DIMILIKI,

		DISEWA, DIKELOLA DI DALAM, ATAU YANG BERDEKATAN DENGAN, KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN DENGAN NILAI KEANERAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN LINDUNG
21	G4-EN12	URAIAN DAMPAK SIGIFIKAN KEGIATAN, PRODUK DAN JASA TERHADAP KEANERAGAMAN HAYATI DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN DENGAN NILAI KEANAREGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN LINDUNG
22	G4-EN13	HABITAT YANG DILINDUNGI DAN DIPULIHKAN
23	G4-EN14	JUMLAH TOTAL SPESIES DALAM IUCN RED LIST DAN SPESIES DALAM DAFTAR SPESIES YANG DILINDUNGI NASIONAL DENGAN HABITAT DI TEMPAT YANG DIPENGARUHI OPERASIONAL, BERDASARKAN TINGKAT RISIKO KEPUNAHAN
	ASPEK :	EMISI
24	G4-EN15	EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) LANGSUNG (CAKUPAN 1)
25	G4-EN16	EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) ENERGI TIDAK LANGSUNG (CAKUPAN 2)
26	G4-EN17	EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) TIDAK LANGSUNG LAINNYA (CAKUPAN 3)
27	G4-EN18	INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
28	G4-EN19	PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
29	G4-EN20	EMISI BAHAN PERUSAK OZON (BPO)
30	G4-EN21	NO _x , SO _x , DAN EMISI UDARA SIGNIFIKAN LAINNYA
	ASPEK :	EFLUEN DAN LIMBAH
31	G4-EN22	TOTAL AIR YANG DIBUANG BERDASARKAN KUALITAS DAN TUJUAN
32	G4-EN23	BOBOT TOTAL LIMBAH BERDASARKAN JENIS DAN METODE PEMBUANGAN
33	G4-EN24	JUMLAH DAN VOLUME TOTAL TUMPAHAN SIGNIFIKAN
34	G4-EN25	BOBOT LIMBAH YANG DIANGGAP BERBAHAYA MENURUT KETENTUAN KONVENSIONAL BASEL ² LAMPIRAN I, II, III, DAN VIII YANG DIANGKUT, DIIMPOOR, DIEKSPOR, ATAU DIOLAH DAN PERSENTASE LIMABH YANG DIANGKUT UNTUK PENGIRIMAN INTERNASIONAL
35	G4-EN26	IDENTITAS, UKURAN, STATUS LINDUNG, DAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI DARI BADAN AIR DAN HABITAT TERKAIT YANG SECARA SIGNIFIKAN TERKENA DAMPAK DARI AIR BUANGAN DAN LIMPASAN DARI ORGANISASI
	ASPEK :	PRODUK DAN JASA
36	G4-EN27	TINGKAT MITIGASI DAMPAK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN PRODUK DAN JASA
37	G4-EN28	PERSENTASE PRODUK YANG TERJUAL DAN KEMASANNYA YANG DIREKLAMASI MENURUT KATEGORI
	ASPEK :	KEPATUHAN
38	G4-EN29	NILAI MONETER DENDA SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON MONETER KARENA KETIDAKPATUHAN

		TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LINGKUNGAN
	ASPEK :	TRANSPORTASI
39	G4-EN30	DAMPAK LINGKUNGAN SIGNIFIKAN DARI PENGANGKUTAN PRODUK DAN BARANG LAIN SERTA BAHAN UNTUK OPERASIONAL ORGANISASI, DAN PENGANGKUTAN TENAGA KERJA
	ASPEK :	LAIN-LAIN
40	G4-EN31	TOTAL PENGELUARAN DAN INVESTASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BERDASARKAN JENIS
	ASPEK :	ASESMEN PEMASOK ATAS LINGKUNGAN
41	G4-EN32	PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA LINGKUNGAN
42	G4-EN33	DAMPAK LINGKUNGAN NEGATIF SIGNIFIKAN AKTUAL DAN POTENSIAL DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL
	ASPEK :	MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN
43	G4-EN34	JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIAJUKAN, DITANGANI DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI
	KATEGORI :	SOSIAL
	SUB-KATEGORI :	PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA
	ASPEK :	KEPEGAWAIAN
44	G4-LA1	JUMLAH TOTAL DAN TINGKAT PEREKRUTAN KARYAWAN BARU DAN TURNOVER KARYAWAN MENURUT KELOMPOK UMUR, GENDER DAN WILAYAH
45	G4-LA2	TUNJANGAN YANG DIBERIKAN BAGI KARYAWAN PURNAWAKTU YANG TIDAK DIBERIKAN BAGI KARYAWAN SEMENTARA ATAU PARUH WAKTU, BERDASARKAN LOKASI OPERASI YANG SIGNIFIKAN
46	G4-LA3	TINGKAT KEMBALI BEKERJA DAN TINGKAT RETENSI SETELAH CUTI MELAHIRKAN MENURUT GENDER
	ASPEK :	HUBUNGAN INDUSTRIAL
47	G4-LA4	JANGKA WAKTU MINIMUM PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN OPERASIONAL, TERMASUK APAKAH HAL TERSEBUT TERCANTUM DALAM PERJANJIAN BERSAMA
	ASPEK :	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
48	G4-LA5	PERSENTASE TOTAL TENAGA KERJA YANG DIWAKILI DALAM KOMITE BERSAMA FORMAL MANAJEMEN-PEKERJA YANG MEMBANTU MENGAWASI DAN MEMBERIKAN SARAN PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
49	G4-LA6	JENIS DAN TINGKAT CEDERA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, HARI HILANG DAN KEMANGKIRAN, SERTA JUMLAH TOTAL KEMATIAN AKIBAT KERJA, MENURUT DAERAH DAN GENDER
50	G4-LA7	PEKERJA YANG SERING TERKENA ATAU BERISIKO TINGGI TERKENA PENYAKIT YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN MEREKA
51	G4-LA8	TOPIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG TERCAKUP DALAM PERJANJIAN FORMAL DENGAN

		SERIKAT PEKERJA
	ASPEK :	PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
52	G4-LA9	JAM PELATIHAN RATA-RATA PER TAHUN PER KARYAWAN MENURUT GENDER DAN MENURUT KATEGORI KARYAWAN
53	G4-LA10	PROGRAM UNTUK MANAJEMEN KETERAMPILAN DAN PEMBELAJARAN SEUMUR HIDUP YANG Mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
54	G4-LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
	ASPEK :	KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN PELUANG
55	G4-LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya
	ASPEK :	KESETARAAN REMUNERASI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
56	G4-LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
	ASPEK :	ASESMEN PEMASOK ATAS PRAKTIK KETENAGAKERJAAN
57	G4-LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
58	G4-LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	ASPEK :	MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN
59	G4-LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
	SUB-KATEGORI :	HAK ASASI MANUSIA
	ASPEK :	INVESTASI
60	G4-HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
61	G4-HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk persentase karyawan yang dilatih
	ASPEK :	NON-DISKRIMINASI
62	G4-HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
	ASPEK :	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
63	G4-HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut

	ASPEK :	PEKERJA ANAK
64	G4-HR5	OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK BERKONTRIBUTSI DALAM PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK YANG EFEKTIF
	ASPEK :	PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA
65	G4-HR6	OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA DAN TINDAKAN UNTUK BERKONTRIBUTSI DALAM PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA
	ASPEK :	PRAKTIK PENGAMANAN
66	G4-HR7	PERSENTASE PETUGAS PENGAMANAN YANG DILATIH DALAM KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK ASASI MANUSIA DI ORGANISASI YANG RELEVAN DENGAN OPERASI
	ASPEK :	HAK ADAT
67	G4-HR8	JUMLAH TOTAL INSIDEN PELANGGARAN YANG MELIBATKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL
	ASPEK :	ASESMEN
68	G4-HR9	JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG TELAH MELAKUKAN REVIU ATAU ASESMEN DAMPAK HAK ASASI MANUSIA
	ASPEK :	ASESMEN PEMASOK ATAS HAK ASASI MANUSIA
69	G4-HR10	PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA HAK ASASI MANUSIA
70	G4-HR11	DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL
	ASPEK :	MEKANISME PENGADUAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA
71	G4-HR12	JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG DIAJUKAN, DITANGANI DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN FORMAL
	SUB-KATEGORI :	MASYARAKAT
	ASPEK :	MASYARAKAT LOKAL
72	G4-SO1	PERSENTASE OPERASI DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT LOKAL, ASESMEN DAMPAK DAN PROGRAM PENGEMBANGAN YANG DITERAPKAN
73	G4-SO2	OPERASI DENGAN DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL
	ASPEK :	ANTI KORUPSI
74	G4-SO3	JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG DINILAI TERHADAP RISIKO TERKAIT DENGAN KORUPSI DAN RISIKO SIGNIFIKAN YANG TERIDENTIFIKASI
75	G4-SO4	KOMUNIKASI DAN PELATIHAN MENGENAI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI-KORUPSI
76	G4-SO5	INSIDEN KORUPSI YANG TERBUKTI DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL
	ASPEK :	KEBIJAKAN PUBLIK
77	G4-SO6	NILAI TOTAL KONTRIBUTSI POLITIK BERDASARKAN NEGARA DAN PENERIMA
	ASPEK :	ANTI PERSAINGAN
78	G4-SO7	JUMLAH TOTAL TINDAKAN HUKUM TERKAIT ANTI PERSAINGAN,

		ANTI-TRUST, SERTA PRAKTIK MONOPOLI DAN HASILNYA
	ASPEK :	KEPATUHAN
79	G4-SO8	NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON-MONETER ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
	ASPEK :	ASESMEN PEMASOK ATAS DAMPAK PADA MASYARAKAT
80	G4-SO9	PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT
81	G4-SO10	DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL
	ASPEK :	MEKANISME PENGADUAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT
82	G4-SO11	JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT YANG DIAJUKAN, DITANGANI DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI
	SUB-KATEGORI :	TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK
	ASPEK :	KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN
83	G4-PR1	PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN YANG DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG DINILAI UNTUK PENINGKATAN
84	G4-PR2	TOTAL JUMLAH INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODE SUKARELA TERKAIT DAMPAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DARI PRODUK DAN JASA SEPANJANG DAUR HIDUP, MENURUT JENIS HASIL
	ASPEK :	PELABELAN PRODUK DAN JASA
85	G4-PR3	JENIS INFORMASI PRODUK DAN JASA YANG DIHARUSKAN OLEH PROSEDUR ORGANISASI TERKAIT DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, SERTA PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN HARUS MENGIKUTI PERSYARATAN INFORMASI SEJENIS
86	G4-PR4	JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TERKAIT DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, MENURUT JENIS HASIL
	G4-PR5	HASIL SURVEI UNTUK MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN
	ASPEK :	KOMUNIKASI PEMASARAN
87	G4-PR6	PENJUALAN PRODUK YANG DILARANG ATAU DISENGKETAKAN
88	G4-PR7	JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TENTANG KOMUNIKASI PEMASARAN, TERMASUK IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR, MENURUT JENIS HASIL
	ASPEK :	PRIVASI PELANGGAN
89	G4-PR8	JUMLAH TOTAL KELUHAN YANG TERBUKTI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN PRIVASI PELANGGAN DAN HILANGNYA DATA PELANGGAN
	ASPEK :	KEPATUHAN
91	G4-PR9	NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA

2.5.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

CSR mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam menjalankannya. CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Menurut Almar, dkk (2012:516) Dengan terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan tidak dapat hanya memberikan keuntungan pada *stakeholder* dan lebih baik mendukung perilaku (misalnya pembelian, mencari pekerjaan, investasi dalam perusahaan), tetapi juga, dalam jangka panjang, dapat membangun citra perusahaan, memperkuat hubungan dengan *stakeholder* perusahaan, dan dapat meningkatkan perilaku advokasi *stakeholder*.

Menurut Muljati (2012) manfaat CSR bagi perusahaan:

1. Meningkatkan Citra Perusahaan
Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
2. Memperkuat “*Brand*” Perusahaan
Melalui kegiatan memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.
3. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan
Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
4. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya

Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.

5. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

6. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan

Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.

7. Meningkatkan Harga Saham

Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dll), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

2.6 Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance menurut *World Bank* (dalam Arief Effendi, 2016:2) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Corporate Governance menurut Kementerian BUMN (dalam Arief Effendi, 2016:3) sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Syofyan (2012:108), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan *Corporate Governance* mengatur hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya *Corporate Governance* diharapkan akan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak-pihak terkait, sehingga terciptanya suatu keuntungan antar pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan membantu masalah yang timbul dalam teori keagenan yaitu adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*.

2.6.1 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1998, dalam Arief Effendi (2016:15), menerbitkan dan menerbitkan OECD *Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membantu para negara anggotanya maupun negara lainnya berkenaan dengan upaya-upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan *regulator corporate governance* dan memberikan pedoman dan

saran-saran untuk pasar modal, investor, perusahaan dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam mengembangkan *corporate governance*.

Pilar-pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh OECD adalah :

1. *Fairness* (Keadilan)

Secara sederhana *fairness* bisa didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai macam bentuk kecurangan.

2. *Transparency* (Keterbukaan informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan ialah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan resiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan *transparency*, perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan dengan mudah pada saat diperlukan.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* adalah praktik audit internal yang efektif, serta kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, dan *statement of corporate*

intent (pencapaian target dimasa depan) serta terhindar dari kondisi *agency problem*.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan ialah kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan didalam prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku tersebut termasuk yang mengenai masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja dan standar penggajian dan persaingan yang sehat.

2.6.2 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN (dalam Arief Effendi, 2016:7) bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Unruk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun melestarikan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; serta
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Menurut Surya dalam Arief Effendi (2016:8), penerapan *Good Corporate Governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Daniri (2014:12), manfaat dari penerapan *Corporate Governance* adalah :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan pada *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
5. Reputasi yang baik. Perusahaan yang menghargai hak pemegang saham dan kreditur serta memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih baik akan memperoleh kepercayaan investor.
6. Peringkat kredit yang baik. Perusahaan yang menerapkan standar CG yang kuat akan memperoleh manfaat berupa peringkat kredit yang baik.

7. Mitigasi risiko. Perusahaan yang menerapkan mitigasi risiko dengan cara: meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko terjadinya fraud; menetapkan proses bisnis dengan jelas disertai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas dari setiap unsur perusahaan, guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang terbebas dari bias irasionalitas; standar CG yang kuat memastikan perusahaan beroperasi demi kepentingan pemegang saham.
8. Meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Struktur dan praktik CG menghasilkan kebijakan dan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas, melaksanakan suksesi manajemen secara efektif serta meningkatkan daya saing perusahaan secara jangka panjang.
9. Meningkatkan akses ke pasar modal. Perusahaan harus membuktikan telah melaksanakan CG agar dipandang layak untuk memperoleh modal yang dibutuhkan.

2.6.3 Perkembangan *Good Corporate Governance*

Menurut Arief Effendi (2016:23) Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code of Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam kode tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan : pemegang saham dan hak mereka; fungsi dewan komisaris perusahaan; fungsi direksi perusahaan; sistem audit; pemangku kepentingan (*stakeholders*); prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan; prinsip kerahasiaan; etika bisnis dan korupsi; perlindungan terhadap lingkungan hidup.

2.6.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Pengelolaan perusahaan (*Corporate Governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor, dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi

yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Governance*

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan CG, (Agoes, 2011:109), yaitu :

- 1) Ukuran Dewan Komisaris
- 2) Dewan Komisaris Independen
- 3) Kepemilikan Instistusional
- 4) Kepemilikan Manajerial
- 5) Komite Audit

Berdasarkan beberapa organ tambahan dalam pernyataan diatas, maka peneliti memutuskan untuk menjadikan Kepemilikan Manajerial sebagai proksi untuk variabel *Corporate Governance*.

2.6.5 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Sujono dan Soebianto dalam Widyanti (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan (*Stakeholders*) maupun para saham perusahaan (*Shareholders*). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada *stakeholders* dan *shareholders* maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan *stakeholders* dan *shareholders* kepada perusahaan. Kepercayaan ini ditunjukkan *stakeholders* dengan diterimanya produk-produk perusahaan sehingga meningkatkan ROA perusahaan.

2.6.6 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Sugairto (2009), Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan

kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dipresentasikan besarnya presentase kepemilikan oleh manajer.

Kepemilikan manajer diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki direksi, manajer, dan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presentase.

Berikut adalah rumusan menghitung variabel kepemilikan manajerial menurut Sugiarto (2009) :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki direksi, manajer, dan komisaris}}{\text{Jumlah saham yang beredar akhir tahun}} \times 100\%$$

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan, dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. (Purwanti dan Setiyarani, 2011).

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan

Para investor melakukan *overview* suatu perusahaan dengan melihat profitabilitas perusahaan. Karena profitabilitas perusahaan dapat mengukur seberapa efektif perusahaan bagi investor. Dimana, salah satu rasio profitabilitas yang dipakai oleh peneliti adalah *Return On Assets* (ROA) sebagai alat analisis utama dalam indikator penilaian kinerja. Dimana, ROA disini digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dan yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. (Ang : 2007 dalam Zubaedah : 2010).

Semakin baik nilai ROA maka secara teoritis kinerja keuangan perusahaan dikatakan baik, yang berakibat pula naiknya harga saham perusahaan. Dimana, harga saham dan jumlah saham yang beredar akan mempengaruhi nilai Tobins Q yang diprosikan dari nilai perusahaan. Jika harga saham dan jumlah saham yang beredar naik maka nilai Tobins Q juga naik (Kusumadilaga : 2010). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Ratri Werdi Erdianty (2015) menemukan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun hasil yang berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Marlina Novitasari (2012) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H1 : Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.7.2 Pengungkapan CSR mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan

Adanya ketidakkonsistenan hubungan antara kinerja keuangan (ROA) terhadap nilai perusahaan menunjukkan adanya faktor lain yang ikut menginteraksi hubungan ROA dengan nilai perusahaan. Dalam hal ini, variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan.

Desakan lingkungan perusahaan agar menerapkan strategi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, variabel CSR diharapkan dapat memberikan *image* perusahaan yang baik kepada pihak eksternal. Keberlanjutan kinerja keuangan yang positif akan mudah dicapai dan diterima oleh pihak eksternal dengan melakukan pengungkapan CSR. Telah disebutkan dan Undang-Undang bahwa perusahaan yang aktivitasnya berhubungan dengan lingkungan alam wajib menerapkan CSR. Hal ini sejalan dengan *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak hanya memandang laba sebagai satu-satunya tujuan dari perusahaan, tetapi ada juga tujuan lain yaitu bentuk tanggung jawab kepada pihak *stakeholder*, karena perusahaan mempunyai tanggung jawab

yang lebih luas dibandingkan hanya mencari laba untuk pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Pengungkapan CSR mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

2.7.3 *Good Corporate Governance* mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan

Peneliti juga memasukkan variabel pemoderasi GCG sebagai suatu struktur yang sistematis untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Proksi yang digunakan adalah kepemilikan manajerial. Berdasarkan Grey *et al.* Dalam Rahayu (2010) struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki. Hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan diperkuat oleh kepemilikan manajerial karena semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri.

Penerapan GCG diyakini mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan agar kepemilikan manajerial dapat memperkuat kinerja perusahaan yang akan menambah nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : *Good Corporate Governance* mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

2.8 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

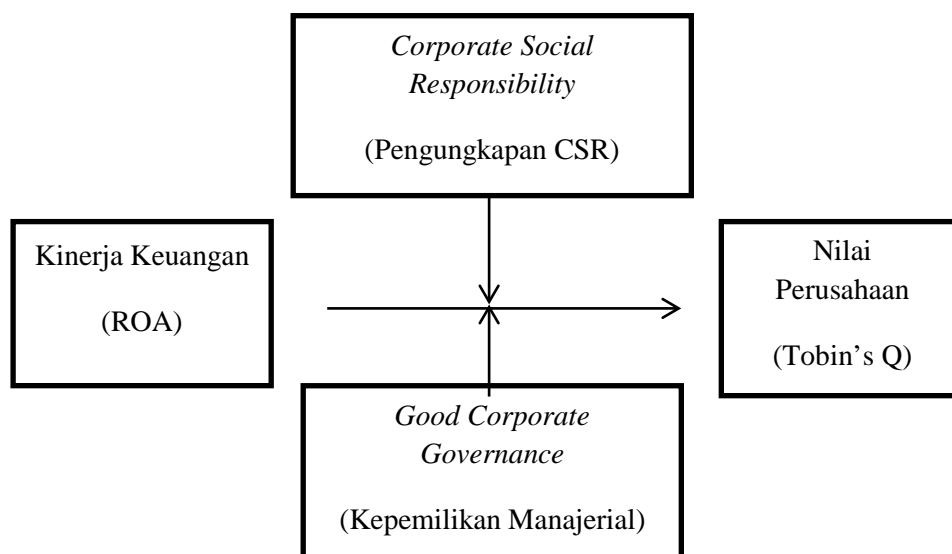
H1 : Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H2 : Pengungkapan CSR mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

H3 : *Good Corporate Governance* mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memperoleh konsep yang lengkap sesuai dengan judul diatas, maka perlu dijelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu variabel bebas (*independent variables*), variabel terikat (*dependent variables*), variabel pemoderasi (*moderating variables*). Pada penelitian ini variabel bebas adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, variabel terikatnya adalah nilai perusahaan, dan variabel pemoderasinya adalah pengungkapan CSR dan GCG.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA diharapkan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan pengungkapan CSR dan GCG dengan indikator kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi adalah *variabel independent* yang

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan *variabel independent* lainnya terhadap *varibel dependent*.

Penambahan variabel pemoderasi CSR dan CG dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan cerminan hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan sehingga dapat mencerminkan kualitas dari perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dapat diharapkan mempengaruhi keputusan investor untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi tersebut dapat meningkatkan penghasilan perusahaan. Demikian juga dengan kepemilikan manajerial yang diukur dari saham kepemilikan manajer, direktur dan komisaris. Dengan kepemilikan saham oleh pihak manajerial diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat lebih menguntungkan perusahaan.

Dengan demikian, apabila kinerja keuangan diinteraksikan dengan CSR dan CG diharapkan berdampak positif terhadap nilai perusahaan sehingga ROA benar-benar dapat meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan harus selalu memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan kepemilikan saham oleh pihak manajerial.